

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 tahun 2010).

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 5 (lima) bentuk opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal (BPK, 2014; Sudiarianti, 2015). Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut

dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Semester II Tahun 2017 pada Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan SPIP terhadap Belanja Daerah terdiri atas 2 kelompok temuan yaitu kelemahan 1 Perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 Lain-lain kelemahan sistem pengendalian internal (BPK, IHPS, Semester II, 2017). Implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual TA 2016 sampai dengan triwulan III tahun 2017 pada Pemerintah Provinsi masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu penyusunan roadmap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak melibatkan semua kepala satuan kerja. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya. Kebijakan dan sistem akuntansi belum seluruhnya diimplementasikan, pemuktahiran database sumber daya manusia belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi. Ambar juga menyebutkan sumber daya manusia pengelola keuangan aset dan TI belum semua memiliki kompetensi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai. Selain itu, Bandar Lampung juga perlu mendapat perhatian yaitu belum mempunyai rencana/strategis dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, para kepala satuan kerja belum mendapat pernyataan tertulis untuk mendukung implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. BPK juga menyorot sistem aplikasi yang dimiliki tidak terintegrasi vertikal dan horizontal. ([www.teraslampung.com](http://www.teraslampung.com)).

Berdasarkan fenomena tersebut maka diketahui bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip

akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukan.

Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari negara (Handayani, 2012). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompotensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkompotensi dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Hakim, 2017).

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendektasian penggelapan (*fraud*). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan oprasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Puspitawati, 2016). Komponen pengendalian intern dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal akan tercapai. Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 60 tahun 2008) serta menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah

yang telah diterima secara umum sehingga pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat dicapai (Indriasih, 2014).

Penelitian (Nugraheta, 2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian (Sudiarianti, 2015 dan Wati, 2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti masih terdapat adanya *research gap* mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintah dan kualitas LKPD. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Sudiarianti, 2015) yang mengkaji pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Perbedaan penelitian ini dengan (Sudiarianti, 2015) adalah obyek penelitiannya yaitu pada lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai responden.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Obyek dalam penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung.

2. Variabel bebas yang digunakan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia.
3. Variabel intervening yang digunakan adalah Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung?
4. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung?
5. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah?
7. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui penerapan standar akuntansi pemerintah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah.

3. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.
6. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
7. Untuk membuktikan secara empiris apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui penerapan standar akuntansi pemerintah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

#### **1. Bagi Praktisi**

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilam kebijakan dan memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang, serta memberikan wawasan dan wacana kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

#### **2. Bagi Akademis**

Adapun kegunaan akademis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta

tambahan literature, terutama mengenai penelitian yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, system pengendalian intern pemerintah, standar akuntansi pemerintah dan kuliatas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Penulis, dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, referensi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan.

**BAB V: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi tentang referensi buku, jurnal dan skripsi yang digunakan sebagai bahan kajian pustaka penelitian.

**LAMPIRAN**

Pada bagian ini berisi tentang lampiran populasi dan sampel penelitian serta data penelitian dan hasil olahan data menggunakan program PLS versi 3.0.